

ABSTRAK

Bambang Jaelani 1168010044 (2022): Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro)

Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat. Ada total 69.791 UMKM dan hanya 2.823 usaha yang mempunyai Izin Usaha Mikro (IUM). Berdasarkan data tersebut maka dipandang perlu bagi suatu bisnis/dunia usaha untuk memiliki IUM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Ukuran dan tujuan kebijakan 2) Sumber daya Instansi dalam pelaksanaan 3) Karakteristik organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat. 4) Komunikasi antar organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung Barat. 5) Sikap atau disposisi kebijakan dan 6) Lingkungan sosial ekonomi politik terkait kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Penelitian ini merujuk pada teori implementasi menurut Van Metter Van Horn, terdapat enam variabel untuk implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan atau lembaga pelaksana, sikap atau disposisi komunikasi antar organisasi terkait, dan kondisi sosial ekonomi, dan politik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan operasional variabelnya adalah menggunakan enam variabel yang terdapat dalam teori implementasi dari Van Horn Van Metter. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. sudah terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan enam variabel implementasi kebijakan dari Van Horn Van Metter, dan beberapa hal perlu adanya masukan guna perbaikan kedepannya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Usaha Mikro

ABSTRACT

Bambang Jaelani 1168010044 (2022): Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment Policies (Study of West Bandung Regency Regional Regulation Policy Study Number 5 of 2016 concerning Micro Business Empowerment)

The local government of West Bandung Regency made West Bandung Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Micro Business Empowerment, to help develop Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in West Bandung Regency. There are a total of 69,791 MSMEs and only 2,823 businesses that have a Micro Business License (IUM). Based on these data, it is deemed necessary for a business/business world to have an IUM.

This study aims to determine 1) The size and objectives of the policy 2) Agency resources in implementation 3) Organizational characteristics of the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, West Bandung Regency. 4) Communication between organizations of the Department of Cooperatives and Micro Enterprises, West Bandung Regency. 5) Attitude or policy disposition and 6) Socio-economic environment related to the policy of West Bandung Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Micro Business Empowerment.

This study refers to the implementation theory according to Van Metter Van Horn, there are six variables for policy implementation, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agencies or institutions, attitudes or dispositions of communication between related organizations, and socio-economic conditions, and politics.

This study uses descriptive qualitative methods, and the operational variables are using six variables contained in the implementation theory of Van Horn Van Metter. Collecting data through observation, interviews, and documentation. Then the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that in implementing the policy of the West Bandung Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Micro Business Empowerment. has been implemented and is running well in accordance with the six policy implementation variables from Van Horn Van Metter, and several things need input for future improvements.

Keywords: Implementation, Policy, Empowerment, Micro Enterprises